

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian Kerja Praktek

Universitas Komputer Indonesia merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis IT. UNIKOM merupakan kampus yang berprestasi yang dapat menghasilkan para ahli yang tidak dimiliki perguruan tinggi lainnya yang dapat bersaing didunia kerja.

UNIKOM sendiri memiliki beberapa fakultas salah satunya adalah Fakultas Ekonomi yang memiliki beberapa program studi salah satunya Program Studi Manajemen, untuk menghasilkan lulusan yang baik dan siap terjun dalam dunia pekerjaan, UNIKOM melalui program studi manajemen melaksanakan kerja praktek yang dimasukkan ke dalam mata kuliah wajib.

Adapun pelaksanaan kerja praktek tidak mengganggu perkuliahan, penulis melaksanakan kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Dimana KPP Majalaya ini merupakan tempat atau sarana bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh pelayanan yang berhubungan dengan pajak, tempat pembayaran pajak bagi wajib pajak. Dengan tujuan menghimpun penerimaan pajak guna membiayai pembangunan di Indonesia.

Selama pelaksanaan kerja praktek penulis ditempatkan di bagian ekstensifikasi, tugas- tugas yang diberikan oleh kepala seksi selama melakukan kerja praktek antar lain, mendata surat himbauan yang akan dikirimkan kepada wajib pajak, menyusun laporan rencana penerimaan dan realisasi pajak dari tahun ke tahun. Tujuan menyusun laporan rencana penerimaan ini adalah untuk mengetahui langkah apa yang harus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar bisa menghimpun penerimaan pajak sesuai rencana penerimaan yang telah dibuat. Rencana ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Penerimaan pajak ini diharapkan membantu negara dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan.

Pembangunan merupakan kegiatan penting bagi seluruh negara di dunia, selain demi meningkatkan kesejahteraan warganya pembangunan tersebut juga dapat menentukan apakah negara tersebut telah mengalami perkembangan, khususnya pada negara-negara yang sedang berkembang dan sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Melaksanakan pembangunan sudah tentu akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit terhadap kas negara. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerimaan bagi negara untuk membiayai segala pengeluarannya dan memajukan pembangunan.

Penerimaan yang didapat selain untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan juga untuk memantapkan kestabilan ekonomi, pemerataan pendapatan serta untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan tujuan

tersebut maka usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan selain dari sektor migas dan non migas adalah melalui sektor perpajakan.

Sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial, dimana pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan.

Pajak itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaannya masuk ke APBN. Pajak Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hasil penerimaannya masuk ke APBD. Jenis Pajak Daerah antara lain Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari Pajak Pusat yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, diperlukan peran aktif dari seluruh masyarakat.

Peran aktif masyarakat disini diartikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak atas fasilitas yang mereka miliki dan mereka rasakan. Contoh dari fasilitas itu sendiri adalah bangunan yang dijadikan tempat tinggal.

Tetapi dalam faktanya masih banyak masyarakat yang belum disiplin untuk membayar pajak atas bangunan yang mereka jadikan tempat tinggal, hal ini mengakibatkan penerimaan pajak tidak mengalami kemajuan yang positif, sedangkan pembangunan negara harus terus berjalan.

Hal ini jelas sekali menghambat tujuan departemen keuangan melalui direktorat jenderal pajak untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Pada faktanya penerimaan Pajak atas bumi dan bangunan sendiri bertujuan untuk memajukan pembangunan pusat dan pembangunan di daerah.

Dewasa ini Departemen Keuangan melalui direktorat jenderal pajak telah mengeluarkan suatu peraturan dimana adanya pembagian penerimaan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang terbagi menjadi dua, yaitu untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan adanya pemerataan pembangunan antara pusat dan di daerah.

Adapun didalam peraturan tersebut dijelaskan pula mengenai pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), alur penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sehingga membuat saya sebagai penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke dalam sebuah laporan praktek kerja lapangan yang berjudul **“Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Di KPP Pratama Majalaya”**.

1.2. Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari kerja praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di KPP Pratama Majalaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan hasil penerimaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di KPP Pratama Majalaya.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pembagian dan penggunaan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di KPP Pratama Majalaya.

1.3. Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan yang diharapkan penulis dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah :

1. Bagi Penulis

- a. Memperoleh pengalaman yang berharga dan bekal pengalaman untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.
- b. Menambah wawasan penulis, terutama pengetahuan yang sebelumnya tidak pernah didapatkan selama perkuliahan.
- c. Mengetahui keadaan lingkungan kerja yang sebenarnya sebagai bahan perbandingan bagi pengetahuan teoritis yang didapat diperguruan tinggi.

2. Bagi Perusahaan

- a. Ikut menunjang program akademik, serta membantu pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja yang berpengalaman di bidangnya.
- b. Sebagai upaya untuk membantu menyiapkan tenaga terampil bagi mahasiswa yang akan terjun ke dunia kerja.
- c. Menjalin kerjasama dan saling mengenal antara Instansi kerja dan pendidikan, sehingga bias dijadikan referensi untuk menyiapkan tenaga kerja yang lebih maju dan kompetitif.

3. Bagi Pihak Luar

Penelitian dalam Kuliah Kerja Praktek ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan.

1.4. Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Penulis melakukan kerja praktek untuk memperoleh data yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, yang beralamat di Jalan Peta no. 7 Bandung.

Adapun waktu pelaksanaan kerja praktek yang disetujui terhitung dari tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan 26 Agustus 2010. Kerja praktek ini dilakukan setiap hari kerja mulai dari pukul 08.00 s.d. 16.30.

